

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU 2014

OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
 - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
 - 1.2 Pengurangan Pengangguran
 - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
 - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
 - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
 - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
 - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
 - 3.1 Ketergantungan Pada Sumber Daya Alam Masih Tinggi
 - 3.2 Perlu Peningkatan Investasi dan Diversifikasi Ekspor
 - 3.3 Rendahnya Kualitas lapangan Kerja
 - 3.4 Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Terbatas
 - 3.5 Potensi Sumber Daya Manusia Cukup Baik Namun Porsi Angkatan Kerja Berpendidikan Rendah Masih Tinggi
 - 3.6 Kualitas Belanja Pemerintah Daerah Kurang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah
 - 3.7 Daya Dukung Lingkungan Cenderung Melemah
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
 - 5.1 Isu Strategis Daerah
 - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

Perkembangan Pembangunan Provinsi Riau 2014

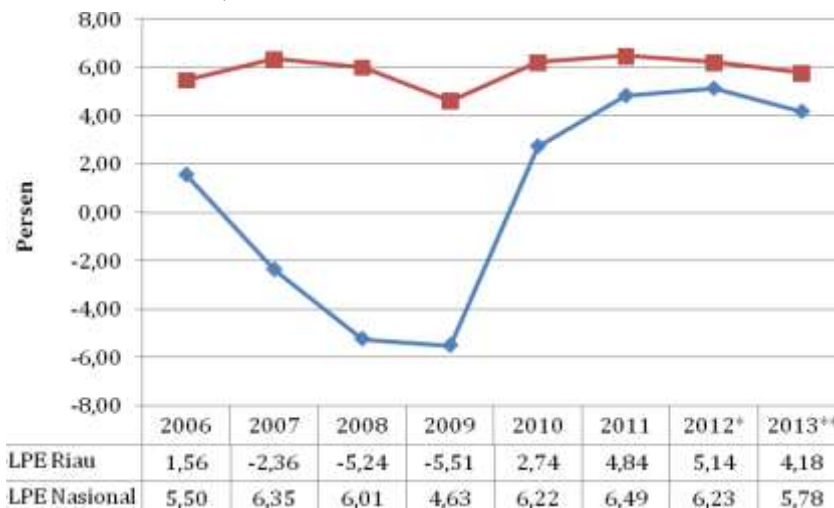
SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Perkembangan Indikator Kinerja Utama

1. Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Riau memiliki peran penting bagi perekonomian wilayah dan nasional. Sumber daya alam Provinsi Riau yang menjadi potensi unggulan antara lain pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, industri, dan jasa. Selama periode 2006-2013, laju pertumbuhan ekonomi Riau selalu di bawah laju pertumbuhan nasional, bahkan mengalami pertumbuhan negatif dalam beberapa tahun (Gambar 1). Hal ini dikarenakan menurunnya peran sektor migas dalam perekonomian Riau. Jika menggunakan pertumbuhan PDRB tanpa migas, perekonomian Riau tumbuh cukup baik. Pada tahun 2013 sumbangan PDRB Riau secara nasional mencapai 6,97 persen, sedangkan sumbangan terhadap PDRB di wilayah Sumatera mencapai 29,31 persen.

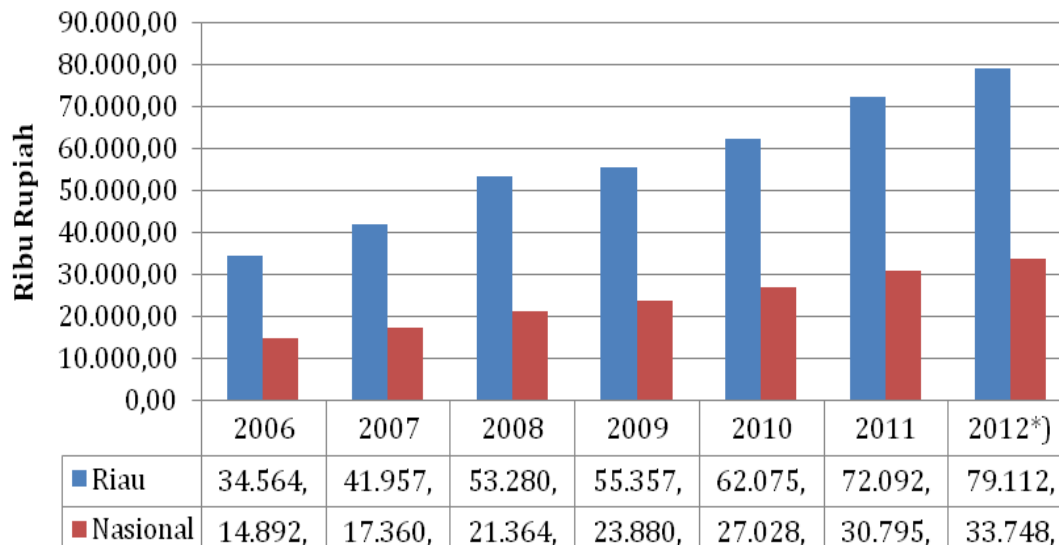
Gambar 1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000



Sumber: BPS, 2013

Kinerja pertumbuhan ekonomi daerah juga merupakan indikasi awal kesejahteraan penduduk. Dalam hal ini, PDRB per kapita Riau selalu berada di atas rata-rata nasional, bahkan jika sektor migas dikeluarkan sekalipun. Meskipun merupakan indikator kasar, hal ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk Riau yang relatif baik secara nasional. Jika pada tahun 2006 rasio antara PDRB perkapita Riau dan PDB perkapita nasional adalah sebesar 232,10 persen, maka pada tahun 2012 rasionya meningkat menjadi 234,42 persen (Gambar 2).

Gambar 2
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

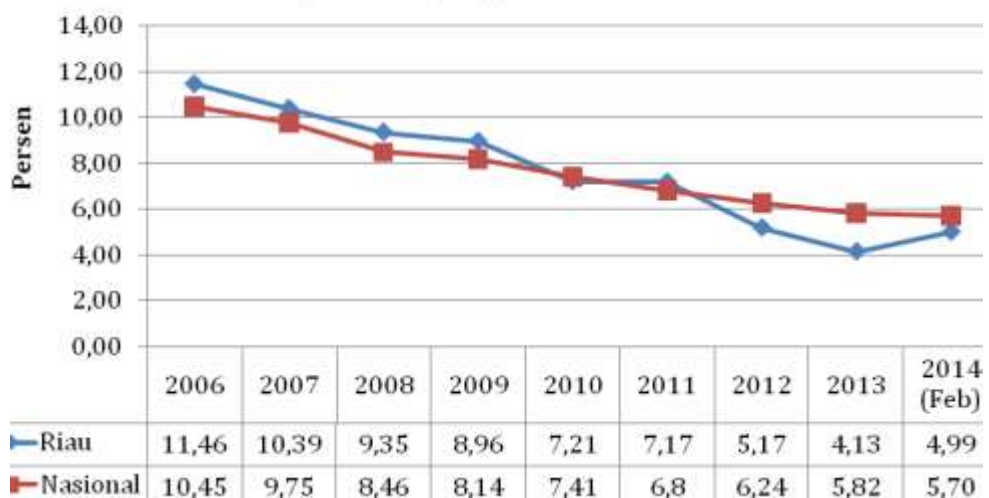


Sumber: BPS, 2013

2. Pengurangan Pengangguran

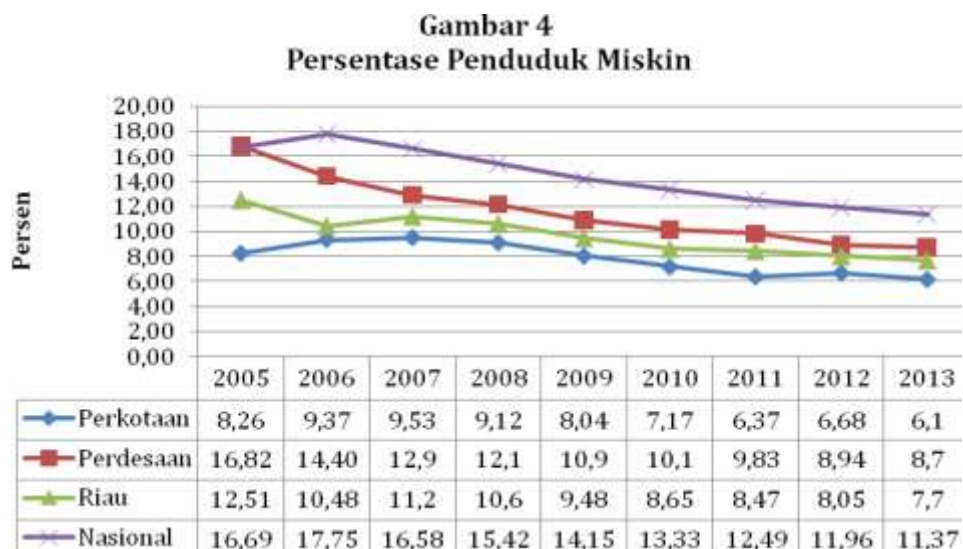
Perekonomian yang terus berkembang di Riau diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup memadai sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) bisa diturunkan. Pertumbuhan ekonomi daerah terlihat mampu menciptakan lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran daerah. Selama periode 2006-2013 tingkat pengangguran di Riau telah berkurang sebesar 7,33 persen (Gambar 3). Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung menurun dan hampir menyamai capaian nasional.

Gambar 3
Tingkat Pengangguran Terbuka



3. Pengurangan Kemiskinan

Perbaikan kesejahteraan masyarakat juga ditunjukkan oleh penurunan tingkat kemiskinan daerah. Persentase penduduk miskin secara terus-menerus turun selama periode 2006-2013 terutama terjadi di daerah perdesaan (Gambar 4). Pertumbuhan sektor pertanian turut menyumbang pengurangan kemiskinan di perdesaan. Keberadaan perkebunan kelapa sawit di Riau membawa perubahan besar terhadap masyarakat perdesaan. Sementara itu, tingkat kemiskinan perkotaan meskipun sempat mengalami peningkatan, namun telah kembali ke tingkat semula. Secara umum tingkat kemiskinan daerah relatif rendah jika dibandingkan dengan rata-rata kondisi di seluruh provinsi.



Sumber: BPS, 2013

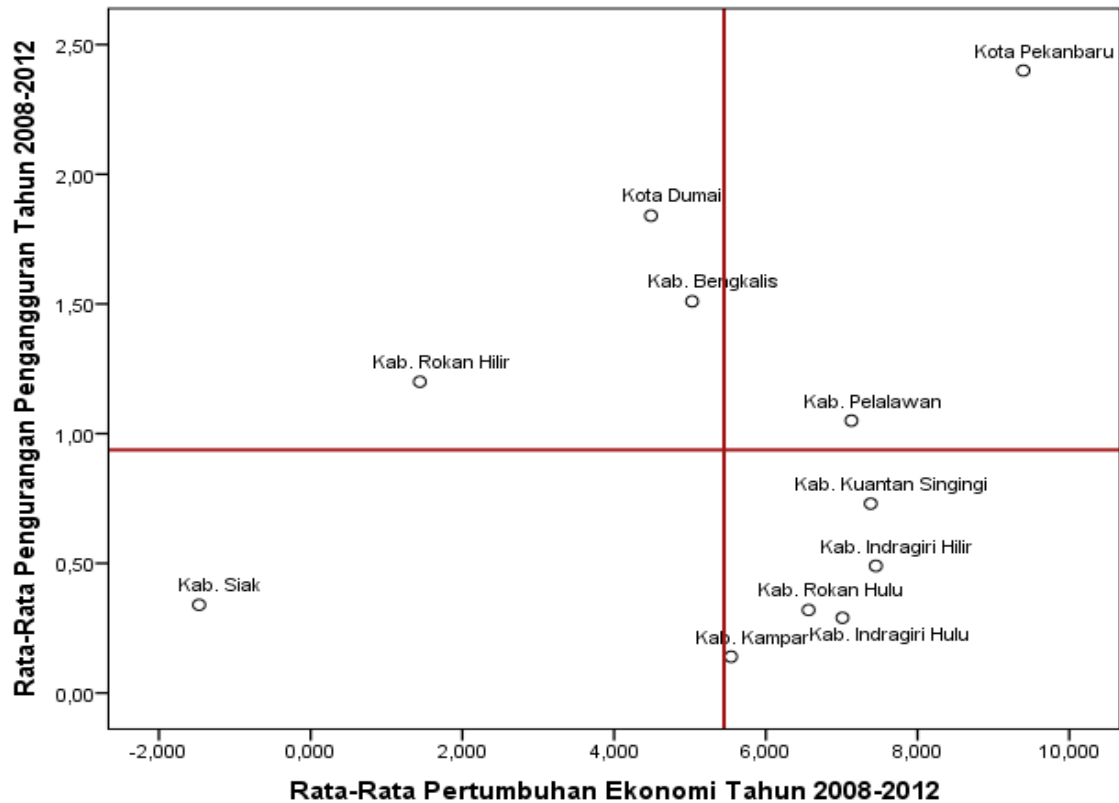
B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seringkali dipahami sebagai peningkatan nilai tambah yang diikuti oleh perluasan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Persebaran kabupaten/kota di Provinsi Riau menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut (Gambar 5). *Pertama*, Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan
Jumlah Pengangguran 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kedua, Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis dan Kota Dumai yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

Ketiga, Kabupaten Siak dan Kampar terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Keempat, Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Kampar, dan Kuantan Singingi terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga

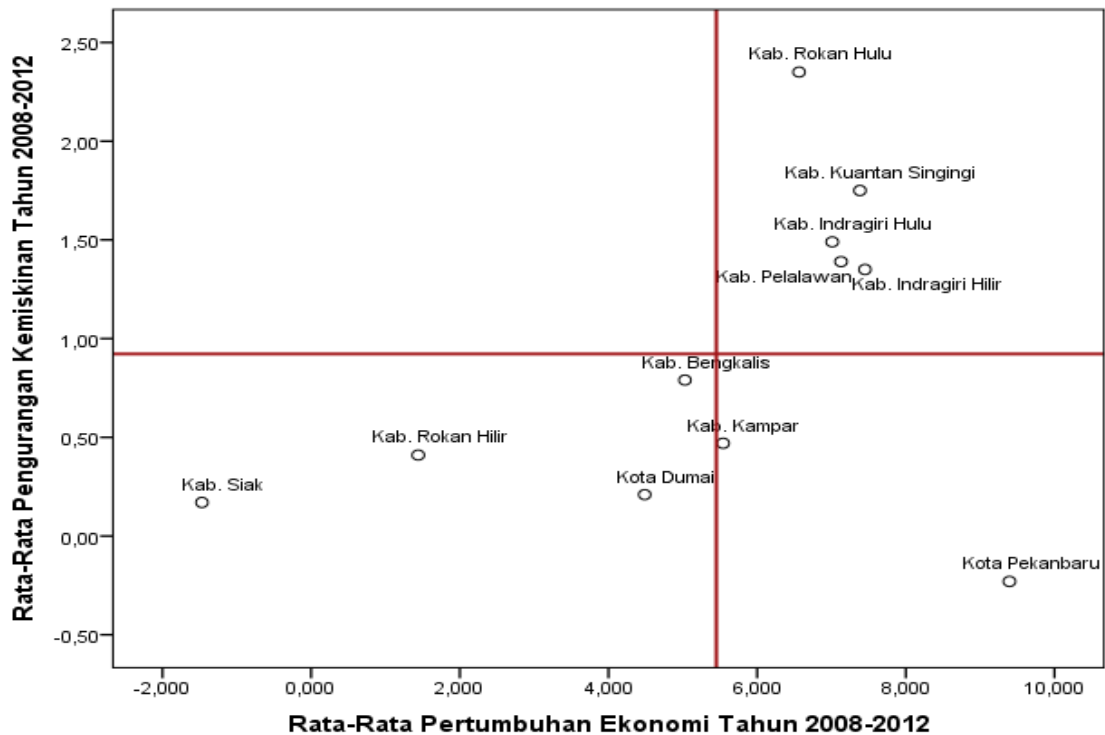
kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 6 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Riau menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan selama tahun 2008-2012 dengan penjelasan sebagai berikut. *Pertama*, Kabupaten Rojan Hulu, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Palalawan, dan Indragiri Hilir termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

Kedua, tidak ada kabupaten dan kota yang terletak di kuadran II dengan kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). *Ketiga*, Kabupaten Rokan Hilir, Siak, Bengkalis, dan Kota Dumai terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan
Jumlah Penduduk Miskin 2008 - 2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Keempat, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

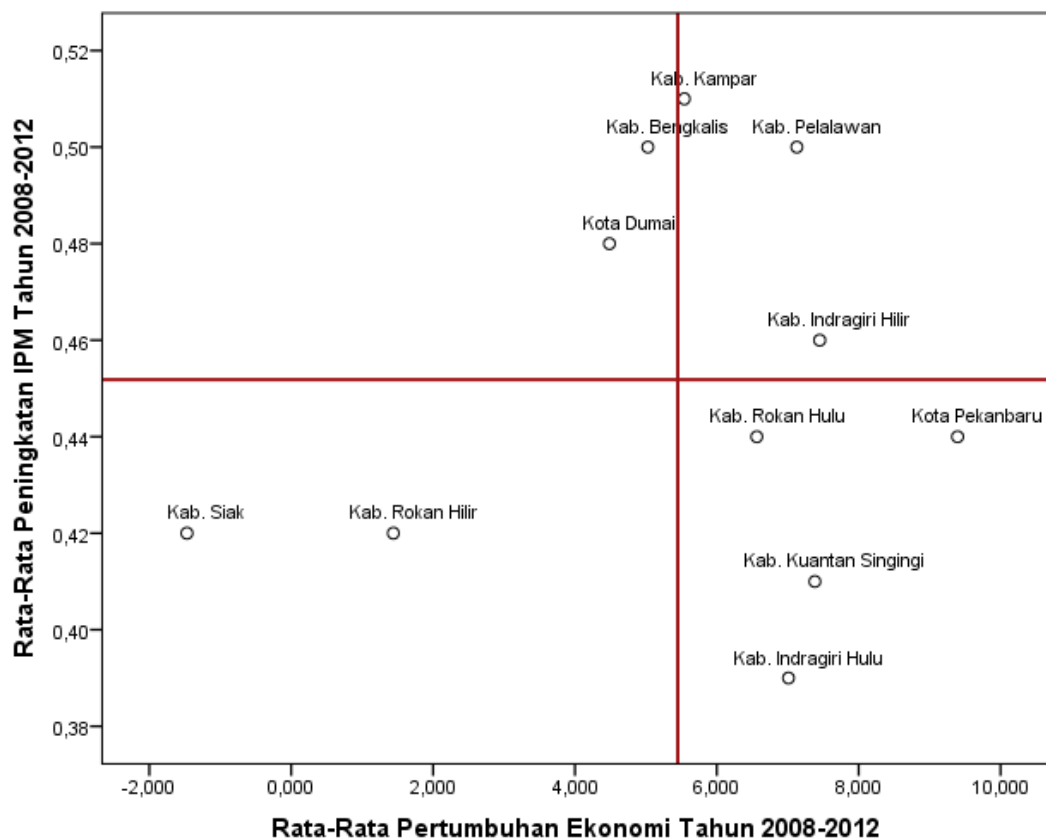
3. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

Distribusi kabupaten/kota di Provinsi Riau menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut (Gambar7). *Pertama*, Kabupaten Pelalawan, Kampar, dan Indragiri Hilir merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Kabupaten Dumai dan Bengkalis yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM 2008 - 2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Ketiga, Kabupaten Siak dan Rokan Hilir terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

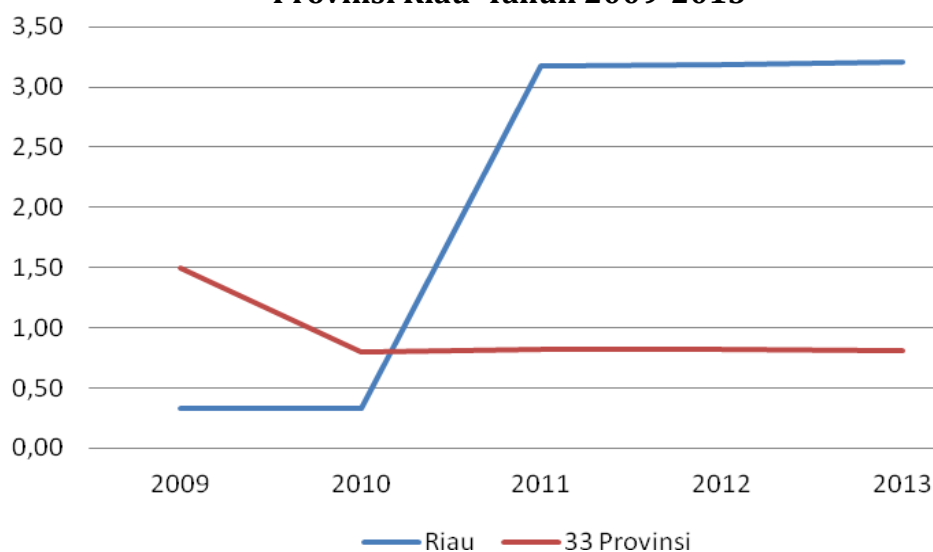
Keempat, Kabupaten Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan

4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Riau yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2007-2012 cukup tinggi. Kesenjangan ekonomi di Provinsi Riau tergolong kesenjangan tinggi dengan kecenderungan semakin meningkat. Kesenjangan ekonomi di Riau dikarenakan perbedaan struktur perekonomian dalam masyarakat. Keberadaan investasi lebih banyak dilakukan di perkotaan terutama pada sektor industri pengolahan yang mampu memberikan *multiplier effect* untuk berkembangnya sektor ekonomi lain daerah. Sementara itu investasi pada sektor lainnya tidak memberikan dampak perekonomian yang besar bagi peningkatan pendapatan

Gambar 8

Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) Provinsi Riau Tahun 2009-2013



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Riau terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah. Nilai PDRB Perkapita tertinggi di Provinsi Riau adalah di Provinsi Bengkalis dan Siak (Tabel 1). Tingginya pendapatan perkapita di Kabupaten Bengkalis dan Siak dipengaruhi oleh keberadaan investasi dalam menggali potensi kekayaan sumber daya alam. Selain itu perdagangan di Kabupaten Siak juga berpotensi tinggi karena terletak di wilayah pertumbuhan ekonomi Singapura-Johor-Riau. Keberadaan Kabupaten Siak yang hanya berjarak 150 km dari Singapura berpotensi besar menjadi daerah relokasi industri dan layanan perdagangan internasional karena banyaknya kapal yang singgah dari Selat Malaka.

Tabel 1
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau 2007-2012 (000/jiwa)

Kab/ Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kuantan Sengingi	30.044	36.333	40.964	46.619	51.874	57.311
Indragiri Hulu	29.006	35.609	42.157	48.394	58.884	66.376
Indragiri Hilir	23.199	28.655	32.112	41.168	49.090	54.101
Pelalawan	40.708	47.229	52.025	54.230	61.618	65.229
Siak	101.297	128.910	120.668	118.564	125.096	129.890
Kampar	26.902	33.415	36.632	40.273	47.002	49.149
Rokan Hulu	19.287	21.739	23.229	24.267	28.843	31.504
Bengkalis	94.209	123.089	110.673	158.911	206.862	203.629
Rokan Hilir	47.444	59.285	63.176	66.096	71.903	75.445
Kepulauan Meranti	-	-	-	45.101	51.070	59.139
Kota Pekanbaru	25.038	29.844	34.636	40.740	48.652	57.868
Kota Dumai	26.410	37.186	44.342	53.783	61.355	67.492
Riau	41.958	53.335	55.387	62.075	72.093	79.113

Sumber: BPS, 2013

C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

1. Ketergantungan pada Sumber Daya Alam Masih Tinggi

Struktur perekonomian Riau didominasi oleh industri pengolahan dan perdagangan. Pada tahun 2013 sektor industri pengolahan yang memiliki pertumbuhan tertinggi pada perekonomian Riau juga memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian (Tabel 2). Berdasarkan struktur PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, sektor pertambangan di Riau masih menyumbangkan kontribusi terbesar bagi perekonomian Riau meskipun pertumbuhan sektor ini semakin menurun.

Tabel 2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha 2013

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	4,28	17,11
2.	Pertambangan	7,09	43,65
3.	Industri Pengolahan	46,70	12,01
4.	Listrik, Gas, Air Minum	0,58	0,23
5.	Konstruksi	8,35	4,43
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	20,08	11,13
7.	Angkutan, Telekomunikasi	4,46	3,70
8.	Keuangan	4,85	1,73
9.	Jasa-jasa	2,60	6,01
		100,00	100,00

Sumber: BPS, 2013

Struktur perekonomian daerah cukup baik jika dilihat dari banyaknya sektor *tradable* (dapat diperdagangkan antardaerah) yang merupakan sektor basis. Sektor-sektor pertambangan migas, tanaman perkebunan, kehutanan, industri pengolahan minyak bumi memiliki nilai *Location Quotient* (LQ) lebih dari satu, yang menunjukkan *proportional share* sektor tersebut lebih besar dari rata-rata nasional (Tabel 3). Dapat diasumsikan sektor-sektor tersebut merupakan komoditas ekspor daerah. Tingginya nilai LQ sektor migas mendominasi perekonomian di Riau, sedangkan komoditas non migas yang menonjol adalah sawit, karet, hasil hutan, dan kertas.

Tabel 3
Nilai LQ Sektor Ekonomi Riau 2008-2012

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1,24	1,26	1,30	1,33	1,34
a. Tanaman Bahan Makanan	0,29	0,29	0,30	0,31	0,31
b. Tanaman Perkebunan	3,10	3,28	3,48	3,68	3,73
c. Peternakan	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61
d. Kehutanan	7,23	7,31	7,19	6,95	6,91
e. Perikanan	0,78	0,79	0,81	0,82	0,85
2. Pertambangan dan Pengalihan	6,22	6,04	6,02	6,16	6,17
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	11,08	11,23	11,49	12,04	12,68
b. Pertambangan Bukan Migas	0,16	0,18	0,19	0,19	0,19
c. Pengalihan	0,40	0,42	0,44	0,49	0,53
3. Industri Pengolahan	0,41	0,42	0,44	0,45	0,45
a. Industri Migas	1,13	1,17	1,23	1,29	1,40
1). Pengilangan Minyak Bumi	2,57	2,61	2,72	2,82	3,03
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	0,34	0,36	0,37	0,38	0,38
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,30	0,28	0,28	0,29	0,29
a. Listrik	0,40	0,39	0,40	0,40	0,39
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	0,32	0,32	0,32	0,34	0,34
5. Konstruksi	0,52	0,54	0,56	0,60	0,65
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	0,47	0,52	0,53	0,54	0,60
a. Perdagangan Besar dan Eceran	0,55	0,61	0,62	0,63	0,69
b. Hotel	0,20	0,21	0,22	0,21	0,23
c. Restoran	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,35	0,34	0,33	0,33	0,35
a. Pengangkutan	0,67	0,68	0,70	0,71	0,75
1). Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Angkutan Jalan Raya	1,04	1,06	1,10	1,13	1,20
3). Angkutan Laut	0,97	1,04	1,13	1,18	1,29

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5). Angkutan Udara	0,30	0,29	0,27	0,26	0,28
6). Jasa Penunjang Angkutan	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28
b. Komunikasi	0,10	0,09	0,10	0,10	0,11
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17
a. Bank	0,11	0,12	0,13	0,14	0,17
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Real Estat	0,23	0,24	0,25	0,25	0,27
e. Jasa Perusahaan	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
9. Jasa-jasa	0,52	0,54	0,56	0,58	0,62
a. Pemerintahan Umum	0,91	0,95	1,00	1,05	1,15
b. Swasta	0,22	0,22	0,23	0,24	0,25
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	0,32	0,34	0,35	0,36	0,38
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,26	0,27	0,28	0,28	0,30

Catatan: LQ dihitung dengan menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Pertumbuhan sektoral di atas membawa perubahan pada struktur lapangan kerja. Selama kurun waktu 2010-2014 peran sektor pertambangan dalam penyerapan tenaga kerja cenderung berkurang (Tabel 4). Sementara itu sektor perekonomian yang mengalami perubahan tenaga kerja secara signifikan antara lain sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa-jasa. Kedepan sektor industri pengolahan perlu berkembang lagi sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor pertanian dan jasa-jasa yang kurang produktif.

Tabel 4
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2014

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014	Perubahan
1	Pertanian	955.376	1.128.799	173.423
2	Pertambangan	57.648	46.089	(11.559)
3	Industri Pengolahan	116.790	146.622	29.832
4	Listrik, Gas, Air	4.643	8.177	3.534
5	Bangunan	119.540	147.340	27.800
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	420.427	545.482	125.055
7	Angkutan & Telekomunikasi	94.755	100.980	6.225
8	Keuangan	37.594	61.074	23.480
9	Jasa-Jasa	371.630	476.764	105.134
	Total	2.178.403	2.661.327	482.924

Sumber : BPS, 2014

Dari gambaran di atas, sebenarnya perekonomian daerah memiliki potensi yang besar untuk bertransformasi dari perekonomian berbasis komoditas primer menjadi perekonomian berciri industri berbasis sumber daya alam. Namun demikian belum terlihat berkembangnya struktur industri di daerah yang memiliki rantai keterkaitan (*linkages*) yang kuat ke depan dan ke belakang meskipun secara sektoral perekonomian sudah didominasi oleh industri pengolahan dibandingkan dengan sektor pertambangan. Produk olahan kelapa sawit yang dikembangkan di Riau adalah *Crude Palm Oil*, padahal potensinya lebih besar untuk dikembangkan menjadi produk turunan yang menghasilkan nilai tambah lebih besar. Demikian juga dengan produk karet alam, belum tumbuh industri pengolahan di daerah. Ke depan, pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan lokal ini menjadi kunci keberhasilan perekonomian daerah mempertahankan pertumbuhan ekonominya meskipun output komoditas migas menyusut.

2. Perlu Peningkatan Investasi dan Diversifikasi Ekspor

Dari sisi penggunaan perekonomian Riau tahun 2013 didominasi oleh ekspor. Peran ekspor secara bersih (*net export*) mencapai lebih dari 30 persen dalam pembentukan PDRB Riau (Tabel 5). Perekonomian yang bertumpu pada sektor ekspor rentan terhadap gejolak krisis global yang diikuti pelemahan permintaan di pasar dunia. Diperlukan sinergi kebijakan antara pemerintah dan pelaku usaha baik di tingkat daerah maupun pusat untuk mendorong diversifikasi pasar ekspor untuk meminimalkan dampak krisis. Kondisi ini sekaligus juga menegaskan perlunya diversifikasi komoditas ekspor dari Riau sendiri. Peluang yang memungkinkan adalah pengembangan industri pengolahan bahan baku yang menghasilkan produk-produk yang kondisi permintaannya relatif inelastis baik di pasar domestik maupun dunia.

Tabel 5
PDRB Provinsi Riau Menurut Penggunaan 2013

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	32,05	25,96
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	0,31	36,14
3.	Konsumsi Pemerintah	5,60	3,50
4.	PMTB	24,75	19,28
5.	Perubahan Stok	7,02	0,12
6.	Ekspor	43,15	36,14
7.	Impor	12,87	21,13
		100,00	100,00

Sumber : BPS, 2013

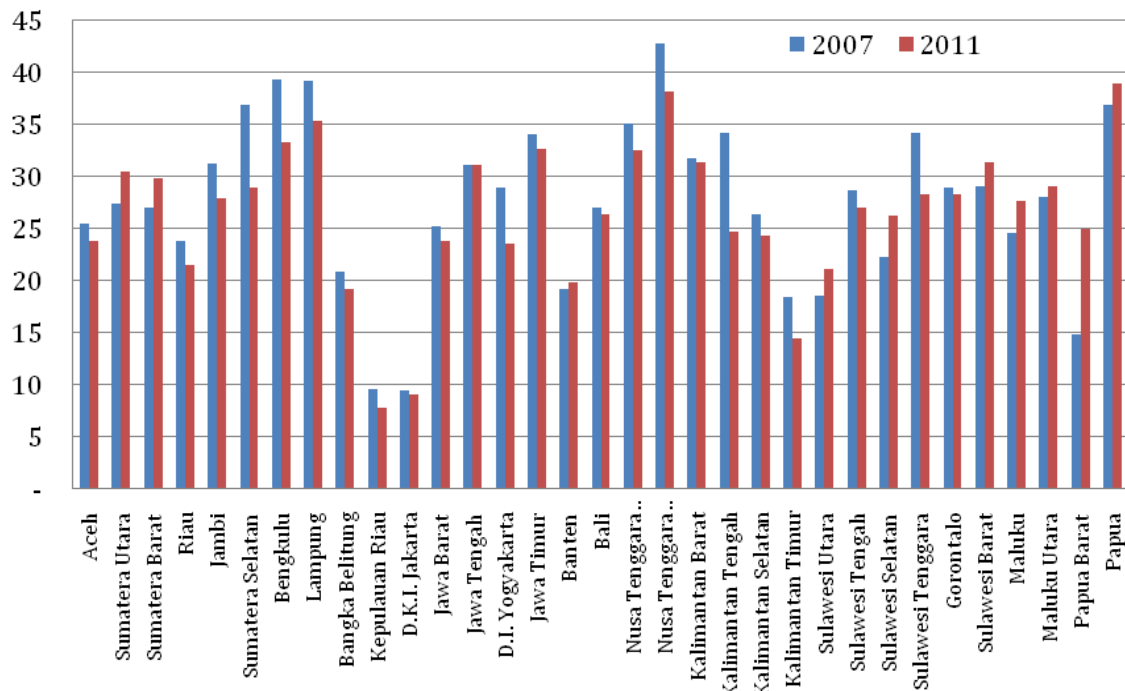
Meskipun secara nominal Riau merupakan salah satu tujuan investasi nasional, namun secara proporsional peran investasi dalam menunjang keberlanjutan pertumbuhan daerah masih perlu ditingkatkan. Secara nominal nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Riau adalah merupakan yang tertinggi di antara provinsi-provinsi lain di luar Jawa dan nilainya terus meningkat secara riil. Investasi diperlukan tidak hanya untuk menggantikan kapital (mesin dan alat produksi) yang

rusak namun juga untuk membangun pabrik baru dan meningkatkan output lebih besar lagi. Dengan potensinya yang besar, realisasi investasi perlu didorong melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif. Provinsi Riau harus mampu menarik dunia usaha agar menanamkan modal untuk berinvestasi di daerah. Salah satu indikatornya adalah kemudahan pelayanan perijinan, peningkatan sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana investasi yang memadai. Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang menarik di daerah, tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan kawasan dan pusat pertumbuhan yang dapat menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan.

3. Rendahnya Kualitas Lapangan Kerja

Kinerja perekonomian daerah yang cukup baik telah mampu menciptakan lapangan kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Riau cenderung turun. Namun demikian kualitas lapangan kerja yang ditunjukkan dari banyaknya pekerja yang bekerja di sektor informal masih tinggi (Gambar 9). Pekerja dalam kondisi demikian diklasifikasikan sebagai setengah pengangguran, yang biasanya dicirikan dengan rendahnya produktivitas dan umumnya beririsan dengan lapangan pekerjaan informal. Para pekerja di kelompok ini sangat rentan untuk masuk dalam lingkaran kemiskinan karena sifat pekerjaan yang tidak pasti dan umumnya mendapatkan upah yang sangat rendah.

Gambar 9
Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas



Sumber: BPS, 2012

4. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Terbatas

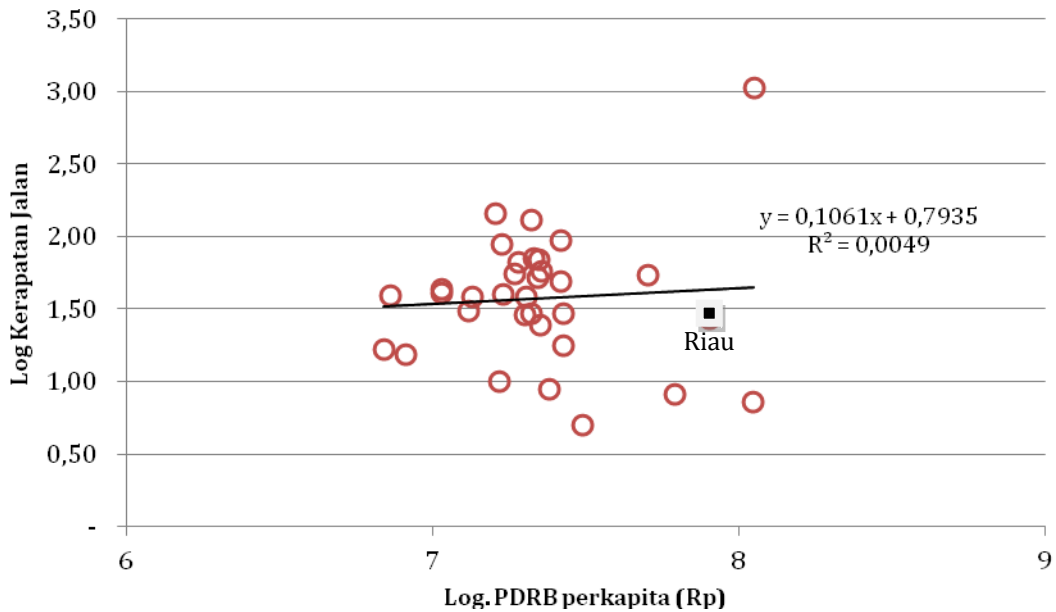
Dengan posisinya yang tepat di tengah-tengah Pulau Sumatera, wilayah Riau dilewati dua jaringan jalan strategis yakni Jalur Lintas Timur dan Jalur Lintas Tengah. Jika dilihat dari indikator kepadatan jalan (*road density*), yakni rasio antara panjang jalan dan luas wilayah, kondisi di Riau masih di atas rata-rata nasional namun tergolong kurang karena berada pada peringkat 24 nasional (Tabel 6).

Tabel 6
Kepadatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kepadatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
29	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
	Indonesia	33.531	25,99

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Gambar 10
Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Dengan membandingkan beberapa provinsi yang memiliki pendapatan perkapita sama, kerapatan jalan di Riau tergolong kurang (Gambar 10). Secara umum terdapat hubungan yang positif antara pendapatan perkapita dan kerapatan jalan. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu perekonomian, semakin tinggi pula tingkat kerapatan jalan wilayahnya. Posisi Provinsi Riau berada di bawah kurva sehingga Riau masih mengalami defisiensi infrastruktur jalan.

Keterbatasan infrastruktur jalan lebih jelas lagi jika dilihat dari sisi kualitasnya. Hanya sepertiga dari seluruh ruas jalan wilayah yang telah beraspal, dan hampir sepertiga hanya berupa jalan tanah. Dilihat dari kondisinya, hampir separuh dari ruas jalan dalam kondisi rusak. Sebagian besar jalan rusak tersebut berada di bawah tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Buruknya kualitas jalan ini akan menghambat distribusi barang, meningkatkan biaya transport, dan mempercepat kerusakan kendaraan. Mengingat pentingnya peran perdagangan dalam perekonomian daerah, maka penanganan masalah jalan ini diperkirakan dapat memicu pertumbuhan daerah yang lebih tinggi lagi. Tantangan yang dihadapi adalah adanya perbedaan kapasitas fiskal antardaerah, khususnya antar kabupaten/kota, dalam mewujudkan integrasi jaringan jalan antarwilayah.

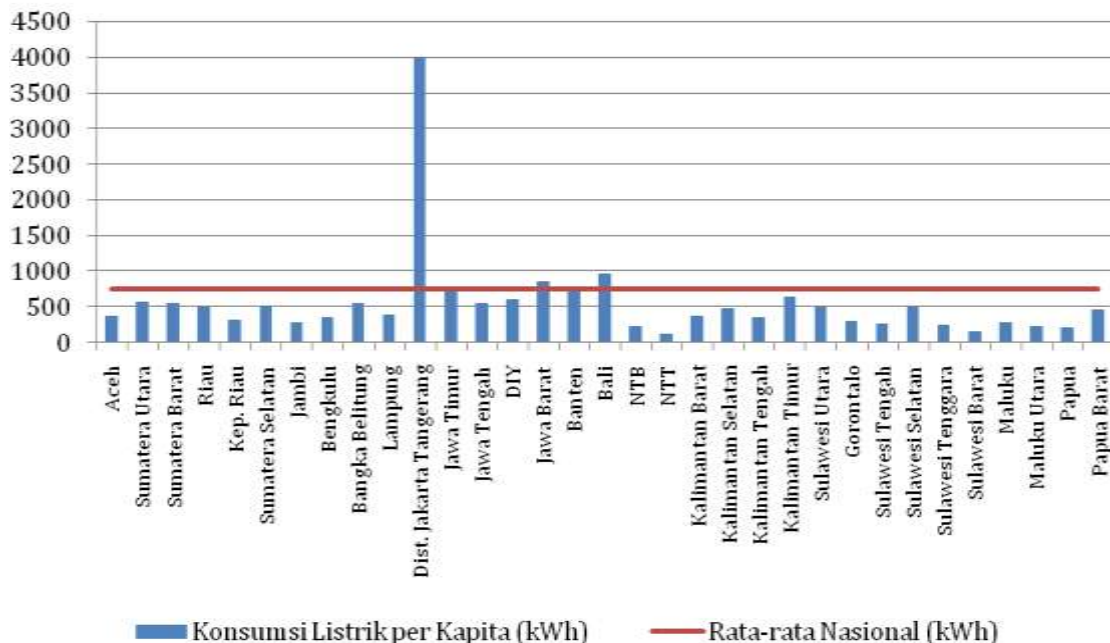
Tabel 7
Jalan Menurut Jenis Permukaan 2012

PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN								Total	
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya			
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Riau	7.035	33	7.465	35	6.454	30	488	2	21.442	100
Sumatera	74.399	50	30.509	20	39.739	27	5.258	4	149.905	100
INDONESIA	258.743	59	72.934	17	91.444	21	14.638	3	437.759	100

Sumber: BPS, 2012

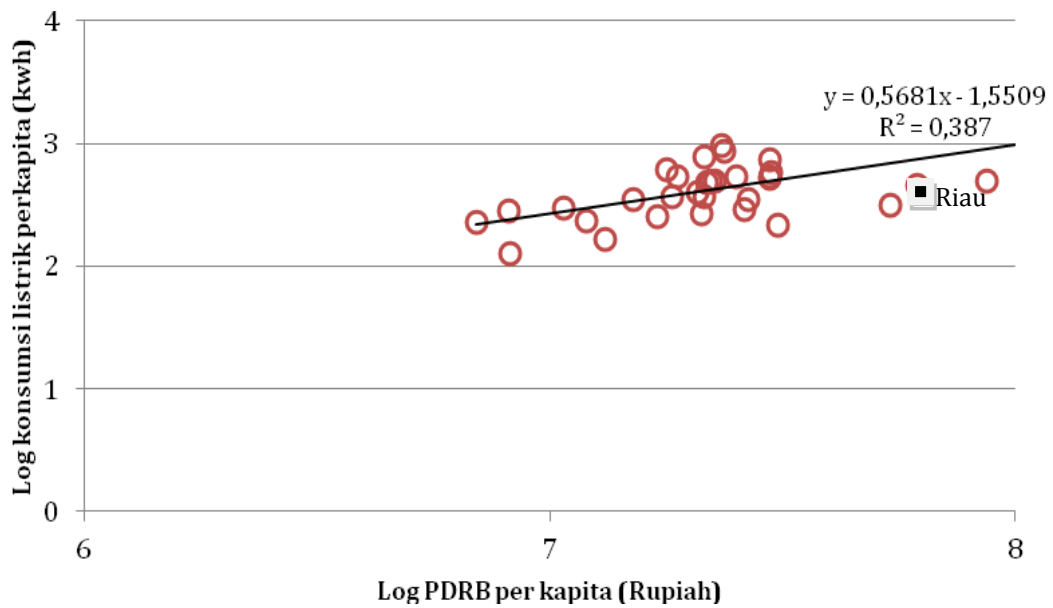
Infrastruktur lain yang mendukung perekonomian wilayah adalah listrik. Secara nasional tingkat konsumsi listrik per kapita Riau masih di bawah rata-rata (Gambar 11). Demikian juga bila diukur dalam hubungannya dengan pendapatan per kapita penduduk, tingkat konsumsi listrik di Riau kurang dari yang seharusnya (Gambar 12). Total konsumsi listrik perkapita di Riau pada tahun 2013 sebesar 497,5 kWh, lebih rendah dari rata-rata konsumsi nasional sebesar 753,7 kWh. Penggunaan oleh industri sendiri masih kurang dari sepuluh persen dan jauh dari ideal untuk mendukung perekonomian. Rendahnya tingkat konsumsi ini paling tidak menggambarkan terbatasnya suplai listrik di tingkat wilayah. Peningkatan suplai listrik diperlukan untuk mendukung berkembangnya industri pengolahan. Terbatasnya suplai listrik bisa menjadi penghambat terealisasinya minat investasi ke daerah.

Gambar 11
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013



Sumber: Statistik PLN, 2013

Gambar 12
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013

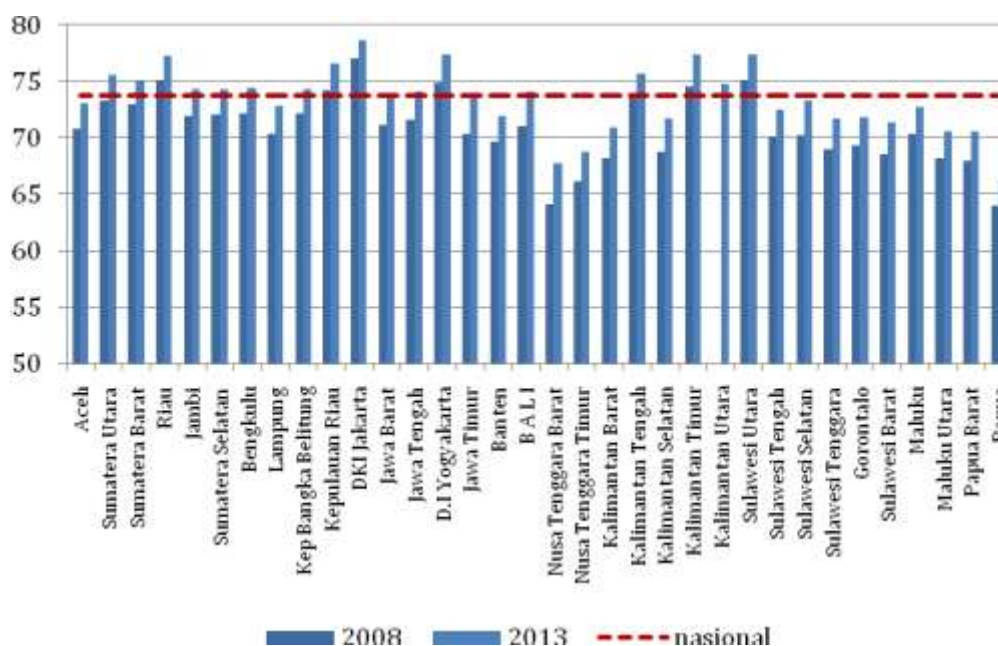


Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) - diolah

5. Potensi Sumber Daya Manusia Cukup Baik Namun Porsi Angkatan Kerja Berpendidikan Rendah Masih Tinggi

Secara nasional kondisi sumberdaya manusia Riau cukup baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau pada tahun 2013 berada pada peringkat 5 nasional dengan nilai IPM sebesar 77,25 lebih tinggi dari rata-rata nasional (Gambar 13). Namun demikian di Provinsi Riau terdapat isu ketertinggalan pembangunan sumber daya manusia bagi daerah yang letaknya jauh dari ibukota provinsi. Tantangan bagi Riau ke depan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah ini adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan secara merata.

Gambar 13
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013



Sumber: BPS, 2013

Tabel 8

Kualitas Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014 (Feb)	Perubahan
1	≤ SD	996.089	1.085.671	89.582
2	SMTp	469.795	487.827	18.032
3	SMTA Umum	590.388	903.723	313.335
5	Diploma I/II/III/Akademi	81.394	93.624	12.230
6	Universitas	101.719	230.320	128.601
Total		2.239.385	2.801.165	561.780

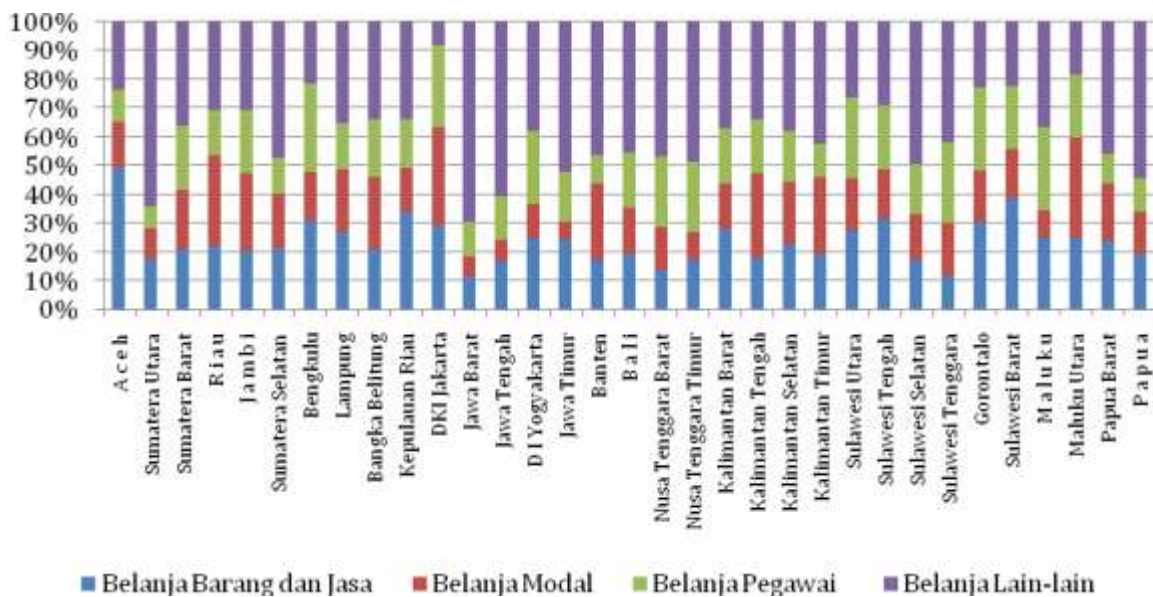
Sumber: BPS, 2014

Dampak investasi pembangunan manusia bagi perekonomian daerah tersalur salah satunya melalui perbaikan kualitas angkatan kerja. Semakin tinggi kualitas angkatan kerja dalam suatu perekonomian semakin tinggi tingkat produktivitas pekerja. Dalam lima tahun terakhir terlihat perbaikan struktur angkatan kerja daerah menurut pendidikan yang ditamatkan. Jika pada tahun 2008 angkatan kerja yang memiliki ijazah minimal SMA (SMA, SMK, Diploma, Akademi, Universitas) sebesar 34,54 persen, pada tahun 2014 porsinya meningkat menjadi 43,83 persen (Tabel 8).

6. Kualitas Belanja Pemerintah Daerah Kurang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Berdasarkan data total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2013, porsi belanja modal dalam total APBD Provinsi Riau sebesar 31,87 persen dan belanja pegawai sebesar 15,30 persen (Gambar 14). Belanja modal memiliki dampak langsung terhadap perekonomian sehingga perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah ini perlu lebih diarahkan pada belanja modal (komponen investasi). Investasi pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian karena merupakan perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta.

Gambar 14
Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013



Sumber: BPS, 2013

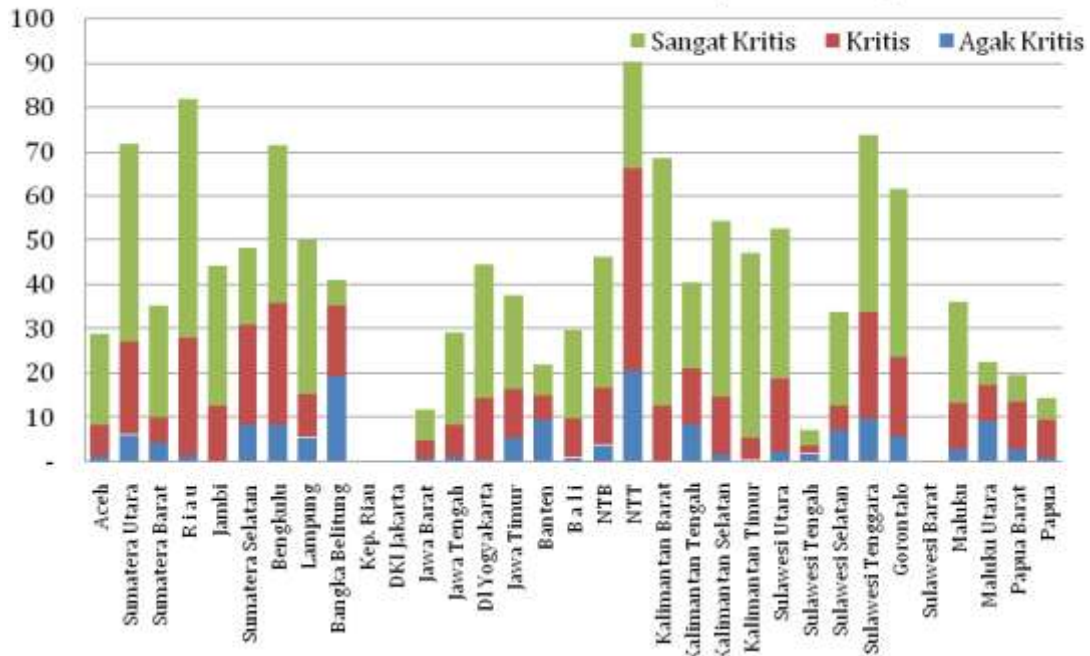
Postur APBD semacam ini kurang responsif terhadap kebutuhan riil percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Fakta ini sangat paradok bila dihubungkan dengan kondisi kerusakan jalan yang amat parah. Infrastruktur wilayah merupakan salah satu kunci utama daya saing dan daya tarik daerah. Tanpa dukungan infrastruktur yang baik, sulit diharapkan terealisasinya potensi investasi yang besar di Riau.

7. Daya Dukung Lingkungan Cenderung Melemah

Pertumbuhan pesat sektor perkebunan dan kehutanan diiringi dengan perluasan lahan tanam secara besar-besaran. Luas lahan untuk perkebunan sawit dan karet di Provinsi Riau semakin berkembang di tahun 2012. Pembukaan lahan perkebunan ini berpotensi menurunkan daya dukung lingkungan, khususnya apabila lahan yang dibuka sebelumnya merupakan hutan. Konversi dari hutan menjadi lahan perkebunan melepaskan karbon ke udara, mengancam keragaman hayati, dan dengan lemahnya pengawasan akan memperbesar ancaman bencana alam. Fenomena rendahnya daya dukung lingkungan ini bisa dilihat dari tingginya luas lahan kritis.

Luas lahan kritis di Riau termasuk yang tertinggi secara nasional dan mencakup 81,7 persen dari total luas wilayahnya (Gambar 15).

Gambar 14
Persentase Luas Lahan Kritis terhadap Luas Wilayah



Sumber: BPS, 2012

Kondisi ini perlu mendapat perhatian pemerintah. Pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan lingkungan untuk dapat berlangsung secara berkelanjutan. Di samping itu, kesejahteraan masyarakat tak hanya dinilai dari besarnya tingkat pendapatan tetapi juga dari berkurangnya risiko guncangan dan meningkatnya kualitas hidup. Peningkatan pendapatan tidak akan ada artinya jika beban yang harus ditanggung masyarakat juga meningkat akibatnya buruknya kualitas lingkungan. Dalam jangka panjang, lingkungan yang dieksploitasi secara berlebihan akan menurun kapasitasnya dalam menyediakan input bagi aktivitas ekonomi dan menyerap serta mendaur ulang limbah yang dihasilkan. Pengendalian pemanfaatan lingkungan perlu mendapatkan prioritas untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah.

D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Dengan potensi yang dimilikinya serta perkiraan dinamika lingkungan yang mempengaruhi, perekonomian Riau diperkirakan akan tumbuh positif hingga tahun 2015. Membaiknya kualitas infrastruktur diperkirakan akan diikuti meningkatnya minat investor dalam mengembangkan industri pengolahan. Berdasarkan kinerja pembangunan selama ini dan modal pembangunan yang dimiliki, prospek pembangunan Provinsi Riau tahun 2015 dalam mendukung pencapaian target utama RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Riau dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 4,6 – 6,8 persen dapat tercapai bila potensi daerah bisa dioptimalkan. Pada tahun 2015 kinerja ekonomi Riau diperkirakan terus membaik yang didukung oleh investasi dan peningkatan pembangunan proyek pemerintah di daerah. Sektor pertanian diperkirakan membaik sejalan dengan meningkatnya kinerja perkebunan kelapa sawit di Riau. Pertumbuhan investasi yang membaik di tahun 2014 akan terus meningkat di tahun 2014. Keberadaan investasi swasta berupa teknologi injeksi kimia pada industri minyak di Riau akan meningkatkan investasi di Riau.
2. Seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi diperkirakan tingkat kemiskinan daerah akan menurun. Namun demikian untuk dapat mencapai target penurunan kemiskinan RPJMN 2015-2019 hingga kisaran 7,0 – 4,7 persen diperlukan upaya lebih keras. Kondisi terakhir kemiskinan di Riau tahun 2013 berada di angka 7,72 persen. Untuk mencapai target RPJMN setidaknya diperlukan penurunan kemiskinan sebesar 3,02 poin persentase selama kurun waktu 2014-2019 atau sebesar 0,5 poin persentase per tahun. Untuk mencapai target penurunan kemiskinan ini diperlukan penajaman upaya penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan akses masyarakat miskin pada peluang-peluang yang ada seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mensinergikan program-program penanggulangan kemiskinan.

E. Penutup

1. Isu Strategis

Dari analisis di atas, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis pembangunan daerah. Isu-isu tersebut adalah permasalahan yang bila ditangani akan berdampak besar pada pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan daerah. Sebaliknya bila permasalahan tersebut diabaikan, maka berpotensi menimbulkan dampak buruk berantai pada sasaran-sasaran pembangunan lainnya. Isu-isu strategis tersebut adalah:

- a. Peningkatan iklim investasi
- b. Peningkatan produktivitas perkebunan
- c. Diversifikasi produk unggulan daerah
- d. Peningkatan infrastruktur wilayah
- e. Pemerataan akses pendidikan
- f. Pendendalian pertumbuhan penduduk
- g. Pengendalian pemanfaatan ruang

2. Rekomendasi kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, disarankan beberapa kebijakan operasional sebagai berikut:

- a. Penyederhanaan proses perijinan usaha dengan mengurangi waktu dan besarnya biaya yang diperlukan.
- b. Difusi teknologi tepat guna di sektor perkebunan melalui revitalisasi penyuluhan pertanian dan peningkatan akses petani pada varitas-varitas baru yang lebih produktif.
- c. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan wilayah.
- d. Peningkatan kapasitas produksi listrik wilayah.
- e. Peningkatan akses pendidikan menengah dan pendidikan vokasional.
- f. Revitalisasi program keluarga berencana / pengendalian pertumbuhan penduduk.
- g. Peningkatan kapasitas pemerintah kota dalam pengelolaan urbanisasi.
- h. Peningkatan pemantauan dampak lingkungan dan pengendalian pemanfaatan lahan untuk perkebunan